



Analisis Pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam Mendukung Kawasan Pariwisata Danau Toba

Analysis of the Establishment of Immigration Checkpoints in Support of the Lake Toba Tourism Area

Jimmi Adi Putra Manurung

Politeknik Imigrasi, Indonesia

*Email: xieh9670@gmail.com

*Correspondence: Jimmi Adi Putra Manurung

DOI:

10.36418/comserva.v2i6.410

Histori Artikel

Diajukan : 12-10-2022

Diterima : 25-10-2022

Diterbitkan : 29-10-2022

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber alam dan pesona alam baik di perairan dan daratan. Oleh karena itu pemerintah menyusun perencanaan pembangunan di sektor pariwisata yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan negara dan daerah pemerintah sehingga dilakukan pembangunan fasilitas yang ada di setiap destinasi pariwisata. Danau Toba masuk bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional diharapkan bisa menjadi objek wisata yang mendatangkan wisatawan domestik dan mancanegara dengan dukungan seluruh daerah yang mengelilingi Danau Toba, termasuk Bandara Raja Sisingamangaraja XII. Adanya orang asing yang masuk dan keluar secara langsung melalui Bandar Udara Internasional Raja Sisingamangaraja XII harus melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang merupakan tugas dan fungsi imigrasi. Tujuan dari penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam mendukung pariwisata kawasan Danau Toba dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Bandar Udara Internasional Raja Sisingamangaraja XII. penelitian yang dipakai adalah kualitatif/deskriptif analitis dengan metode pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif yang dilakukan dengan melakukan dengan kajian penelitian yang analitis. Berdasarkan hasil dari penelitian melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan diketahui bahwa saat ini dalam beberapa hal dapat dikatakan pembentukan bandara sudah baik dan Efisien dalam menjalankan tugas dan fungsi imigrasi. Akan tetapi masih ada beberapa yang perlunya dilakukan perbaikan dari fungsi teknis maupun fasilitatif terutama saat kedatangan internasional sehingga imigrasi memberikan pelayanan yang optimal saat pemeriksaan keimigrasian.

Kata kunci: Efisiensi; Tempat Pemeriksaan Imigrasi; Imigrasi

ABSTRACT

Indonesia is a country that has a wealth of natural resources and natural charm both in waters and land. Therefore, the government prepares a development plan in the tourism sector, namely the National Tourism Strategic Area which aims to increase the source of state and local government revenue so that the existing facilities are built in each tourism destination. Lake Toba is part of the National Tourism Strategic Area, which is expected to become a tourist attraction that brings in domestic and foreign tourists with the support of all areas surrounding Lake Toba, including Raja Sisingamangaraja XII Airport. Foreigners who enter and exit directly through King Sisingamangaraja XII International Airport must go through the Immigration Checkpoint which is the duty and function of immigration. The purpose of the study was to determine

and analyze the establishment of an Immigration Checkpoint in supporting tourism in the Lake Toba area with the research location being carried out at Raja Sisingamangaraja XII International Airport. The research used is qualitative/analytical descriptive with a case study approach. Descriptive research is carried out by conducting analytical research studies. Based on the results of research through interviews, observations, documentation, and literature studies, it is known that currently in some ways it can be said that the establishment of airports is good and efficient in carrying out immigration duties and functions. However, there are still some things that need to be improved from technical and facilitative functions, especially during international arrivals so that immigration provides optimal services during immigration checks.

Keywords: *Efficiency; Immigration Checkpoints; Immigration*

PENDAHULUAN

Banyaknya pulau yang dimiliki Indonesia tidak menutup kemungkinan bagi Indonesia untuk mengembangkan Indonesia, salah satunya berasal dari pariwisata (Tasik et al., 2019). Menurut *United Nations World Tourism Organization* (Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa), jumlah orang yang bepergian antar negara untuk tujuan perjalanan terus meningkat setiap tahun. Jika relevan secara ekonomi, pariwisata adalah ekonomi yang berkelanjutan karena pertumbuhannya yang cepat (Damanik et al., 2022).

Pengaruh pariwisata yang membawa manfaat besar membuat Indonesia mengalihkan perhatiannya pada pariwisata, berkat adanya kebijakan bebas visa dan optimalisasi pengembangan setiap tempat yang berpotensi menjadi destinasi wisata (Iqbal, 2022). Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional 2010-2025, yang menekankan untuk lebih mendukung dalam sektor pembangunan, khususnya di wilayah prioritas pembangunan, dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung serta moda transportasi yang lebih mendukung (Hajar et al., 2022).

Badan Pusat Statistik menjelaskan, jumlah wisman yang berkunjung ke Sumut termasuk Danau Toba sebanyak 22.737 pada 2018 dan sebanyak 22.234 pada 2019, dengan jumlah wisman asal Malaysia terbesar yakni 53,02% (Statistik, 2020).

Sebagai arah tanggung jawab di bidang keimigrasian, keimigrasian memiliki empat fungsi, yaitu: memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan nasional, dan memajukan pembangunan kesejahteraan masyarakat (Muta'ali et al., 2018). Dari keempat fungsi tersebut, salah satu yang memberikan dan membantu perekonomian Indonesia adalah memajukan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena imigran mendukung perekonomian Indonesia melalui biaya seperti paspor dan visa. Di samping itu, hal lain yang bisa dikatakan dapat mendukung perekonomian Indonesia adalah dengan memberikan izin masuk dan izin tetap di Indonesia dengan mudah bagi orang asing yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing serta investor sukses yang akan menginvestasikan dananya untuk mendukung proyek strategis nasional (Mirwanto, 2016).

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pada pasal 9 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi." (dalam Arifin, 2018) artinya investor, tenaga ahli, WNA dan WNI yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia wajib melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan, wawancara, pengambilan dan pemeriksaan terkait keimigrasian lainnya, yang dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Menurut Direktorat Jenderal Imigrasi, terdapat 6

kantor imigrasi di Sumatera Utara, 5 TPI melalui laut dan 2 TPI melalui udara (Wirasto et al., 2015). TPI terdekat dengan Proyek Strategis Nasional di Kawasan Danau Toba adalah Bandara Internasional Raja Sisingamangaraja XII, yang merupakan bagian dari kantor imigrasi sekunder TPI Pematang Siantar.

Orang Asing dari Bandar Udara Raja Sisingamangaraja XII berlibur di kawasan Danau Toba dengan tujuan melihat wisata berupa: wisata kerajinan, pemandangan alam, melihat benda-benda peninggalan yang bersejarah, ziarah, upacara adat, seni pertunjukan tradisional dan lainnya telah disediakan oleh Kabupaten Dinas Pariwisata setempat. Sejak April 2020, Bandara Raja Sisingamangaraja XII menghentikan sementara operasi atau tidak menerima penerbangan internasional akibat penyebaran Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia, hal ini berdasarkan informasi dari World Health Organization (WHO), oleh karena itu pembatasan jumlah negara yang melakukan perjalanan antar negara dan menutup perbatasan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan dan mencari informasi lebih dalam hanya melalui interpretasi pengalaman atau observasi (Sugiyono, 2018). Jenis metode dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan kualitas atau karakteristik dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan dengan metode kuantitatif (Saryono, 2010). Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder dengan penelitian tentang. Semua data tersebut kemudian diolah, diorganisasikan ke dalam kategori-kategori, digambarkan sebagai unit-unit, disintesis, disusun menjadi pola-pola, dipilih mana yang penting, yang akan dipelajari, dan ditarik kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Machmud, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut pejabat Laksmi Wahyu dan Nina Widowati (Sulistiyani, Hadrianus, & Nursam, 2019), pemeriksaan dokumen keimigrasian di TPI Bandara Internasional Raja Sisingamangaraja XII menganut asas simple public efficiency, tata perijinan yang tidak memperbolehkan orang asing dan warga negara Indonesia masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pada saat pemeriksaan persyaratan lain di bidang keimigrasian, karena pejabat bekerja sesuai SOPnya. Pengecekan dilakukan dengan memastikan bahwa data di paspor sesuai dengan pemegang dan jangka waktu izin tinggal di Indonesia bagi orang asing yang akan masuk.

Penumpang yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional King XII di Sisinga Mangaraja masih menggunakan kartu kedatangan, yang menjelaskan data singkat perjalanan WNA tersebut selama di Indonesia. Jika data masih belum lengkap, staf akan dengan sopan dan persuasif menjelaskan data yang hilang dan meminta untuk mengisi kartu sehingga Anda dapat mempelajari informasi yang relevan. Kemudian ada prinsip ketepatan waktu saat memeriksa dokumen keimigrasian di TPI, tidak ada aturan waktu yang diterapkan petugas kepada setiap penumpang, dan tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Pelaksanaan di lapangan batu memerlukan pengecekan penumpang yang diperkirakan memakan waktu kurang lebih dua sampai tiga menit per orang.

Bagi petugas, meskipun TPI ditugaskan kepada JFU dan Analis Keimigrasian, dalam melaksanakan tugasnya tetap membawahi dan atas perintah Kepala Kantor TPI Sekunder Kantor Pematang Siantar dan dibantu oleh salah satu Pejabat Struktural. Pejabat Imigrasi Struktur Departemen Imigrasi Tingkat 2 TPI Pematang Siantar. Nah, kendala yang dihadapi oleh staf antara lain penguasaan

bahasa asing, dan penumpang yang tidak terlalu fasih berbahasa Inggris, yang menghambat transfer informasi dan informasi yang dibutuhkan, menyebabkan miskomunikasi dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjelaskan kepada penumpang.

Baik WNA maupun WNI merasa nyaman karena pengaduan tentang pelayanan pemeriksaan keimigrasian dan kondisi bandara tidak dilaporkan ke petugas atau kantor sekunder Imigrasi di TPI Pematang Siantar. pt. Angkasa Pura II juga meminta maaf kepada penumpang atas kurangnya pelayanan penunjang di Bandara Internasional Raja Sisingamangaraja XII. Terkait antrian, petugas juga mengajukan layanan prioritas, namun penumpang terkadang menolak dan tetap mengantri karena mengetahui situasi bandara dan mengetahui aturan antrian. Salah satu ukuran untuk mengetahui tingkat efisiensi menurut Syamsi (Mangestianto, 2018) adalah Satisfaction Index yang didasarkan pada hasil survei penumpang pada penerbangan internasional. Berdasarkan temuan berikut dari PT. Penumpang Angkasa Pura II merasa puas dengan pelayanan yang diberikan pada penerbangan internasional, antara lain petugas, pemeriksaan paspor, fasilitas bandara dan lainnya.

Untuk menjaga keamanan data transit TPI salah satunya Bandara Internasional Raja Sisingamangaraja XII, maka untuk area keimigrasian termasuk area kedatangan dan keberangkatan, Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) mendukung teknologi. Sistem tersebut merupakan inovasi Direktorat Jenderal Imigrasi dan merupakan bagian dari peningkatan pelayanan publik TPI oleh Departemen Imigrasi. Penggunaan SIMKIM secara keseluruhan telah digunakan di seluruh unit pelaksana teknologi keimigrasian seperti Biro Imigrasi, TPI, dan kantor perwakilan imigrasi asing, dan telah dilaksanakan dengan baik.

Contoh implementasi SIMKIM adalah pembuatan sistem Border Control Management (BCM) yang telah diterapkan di seluruh TPI di Indonesia. Sistem BCM dengan sistem lain seperti PMS, Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), Sistem ECS, Sistem Izin Tinggal, Sistem VISA, dan lainnya merupakan sistem yang saling berkaitan dan terintegrasi yang digunakan keperluan pemeriksaan keimigrasian TPI (Wilsonotomo et al., n.d.). Salah satu kegunaan dan fungsi BCM yang sangat penting adalah sangat membantu petugas yang ditempatkan di loket imigrasi, sebagai sarana identifikasi paspor orang asing atau warga negara Indonesia, dan sebagai sarana pengecekan penumpang pada daftar pencegahan dan mereka yang telah lulus dengan alat yang digunakan dalam TPI. Keimigrasian dalam bentuk kebijakan selektif dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga mengurangi kemungkinan warga negara Indonesia keluar dari wilayah Indonesia karena dimasukkan dalam daftar pencegahan pelanggaran hukum Indonesia.

Kegunaan dan manfaat dari BCM tersebut terhadap pengamanan data pelintas sudah berjalan dan baik dan efisien akan tetapi dalam pengoperasian sistem tersebut di Bandar Udara Internasional Raja Sisingamangaraja XII kadang terjadi kendala jaringan. Problem yang lumrah ada dalam setiap instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik antara lain salah satunya pada bagian pemeriksaan di bandara sehingga petugas membutuhkan waktu lebih akibat kendala gangguan jaringan internet. Walaupun permasalahan umum pelaksanaan bandara dalam hal pemindaian data tetap masuk ke dalam sistem karena berdasarkan hasil wawancara dari petugas di TPI belum ada kasus yang ditemukan pemindaian data paspor tidak tersimpan di BCM yang hal ini bisa merugikan Warga Negara Indonesia ataupun Orang Asing. Sistem BCM dalam keamanan data sudah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian dalam keamanan data petugas bekerja sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.

Penggunaan anggaran hanya berlaku pada tahun 2019, karena penyerapan anggaran sudah mendekati 100%, sehingga anggaran tahun 2020 mengalami peningkatan sekitar 11%, sedangkan penyerapan anggaran tahun 2018 belum efektif sehingga mengakibatkan penurunan anggaran tahun 2019 dibandingkan anggaran tahun sebelumnya sekitar 11% 7,9%. Penyerapan anggaran 2020 tidak efisien karena belum ada penyaringan keimigrasian dan transfer anggaran di Bandara Internasional TPI Raja Sisingamangaraja XII sejak April 2020.

Tabel 1. Anggaran TPI Bandar Udara Internasional Raja Sisingamanagaraja XII

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase Penyerapan	Hasil
2018	469.925.000,00	298.675.400,00	63 %	Belum Efisien
2019	375.015.000,00	361.200.600,00	96 %	Efisien
2020	428.875.000,00	215.146.500,00	50 %	Belum Efisien

Sumber: *Pengelolaan Data Observasi, 2021*

Berdasarkan tabel 1. di atas, dari segi keamanan data, pejabat tersebut mengatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan telah berjalan dengan efisien, dalam hal ini pengamanan data yang lewat dari TPI Bandara Raja Sisingamangaraja XII telah dilengkapi dengan *technical support* yaitu SIMKIM di bidang keimigrasian, daerah masuk dan keluar. Pemeriksaan penumpang asing yang masuk oleh petugas keamanan dilakukan dalam enam tahap, yaitu: petugas memeriksa dokumen perjalanan, melakukan wawancara, memeriksa visa, memindai dokumen perjalanan, mengumpulkan biometrik, dan memeriksa daftar pencegahan. Pemeriksaan yang diperlukan bagi AO yang akan meninggalkan wilayah Indonesia hampir sama dengan pada saat kedatangan, mulai dari pemeriksaan dokumen perjalanan, wawancara dengan orang asing, pemeriksaan ulang izin masuk dan keluar, pemindaian dokumen perjalanan, membawa biometrik, dan namanya tidak dicantumkan dalam daftar larangan. Untuk keamanan WNI yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia, petugas imigrasi TPI memiliki empat tahapan pengamanan yaitu: memegang dokumen perjalanan dan tiket pesawat yang masih berlaku, tidak dimasukkan dalam daftar pencegahan, melakukan wawancara dan pemeriksaan dokumen perjalanan, dan perjalanan Pemindaian akhir dokumen.

Fasilitas yang ada di Area Kedatangan Bandara Raja Sisingamangaraja XII antara lain Ruang Antrian Penumpang, yaitu tempat penumpang melakukan check in barang, orang/penumpang dan dokumennya; konter check-in bagi WNA atau WNI yang meninggalkan Indonesia Lokal, petugas imigrasi wajib menurut undang-undang untuk memeriksa dokumen perjalanan; ruang utama yang merupakan bagian dari keseluruhan imigrasi; dan ruang tambahan seperti ruang rapat, ruang arsip, ruang tunggu, ruang makan, dan dapur.

Dalam hal ini peran imigrasi adalah memberikan kemudahan sebagai penyedia pelayanan keimigrasian untuk membantu pembangunan nasional seperti KSPN, yang berarti bahwa imigrasi memberikan fasilitas untuk penyedia perizinan keimigrasian salah satu pelaksanaan dari fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (Hanief et al., 2018). Atas dasar itu, keimigrasian memberikan dukungan untuk membantu pelaksanaan program pemerintah, yang dicapai dengan memberikan izin keimigrasian untuk membantu meningkatkan investasi asing yang dapat membangun perekonomian bangsa Indonesia. Salah satu bentuk nyata KSPN untuk mendukung orang asing yang melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dapat menggunakan Visa Waiver (BVK) yang

dikeluarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. BVK yang diberikan berlaku selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang atau dipindahtangankan.

SIMPULAN

Efisiensi penyaringan di Bandara Internasional Raja Sisingamangaraja XII dalam mendukung imigrasi di kawasan wisata Danau Toba menjadi salah satu faktor pendukung perkembangan pariwisata khususnya di Sumatera Utara, bahkan lebih baik lagi, hal ini berdasarkan hasil survei penumpang dengan nilai tinggi, khususnya pemeriksaan keimigrasian. Namun penggunaan sistem pengambilan biometrik masih belum optimal karena gangguan jaringan, pemeriksaan keimigrasian di TPI Bandara Internasional Raja Sisingamangaraja XII pada saat kedatangan tidak efisien karena pelaksanaan pemeriksaan langsung di pintu masuk bandara, sehingga antrian bisa sampai ke landasan, kemudian jika hujan, akan ada masalah yang membuat penumpang merasa tidak nyaman selama proses pemeriksaan.

Peran Dinas Imigrasi dalam mendukung kawasan wisata Danau Toba sudah berjalan dengan baik dan siap mendukung kawasan wisata Danau Toba yaitu dengan menawarkan kepada orang asing bentuk izin keimigrasian bebas visa, yang berdasarkan data perjalanan dari Sisinga Orang Asing transit di Bandara Internasional King Manggalaja XII. Namun, mereka yang melewati pos pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional King Manggalaja XII di Sicingja menggunakan data transit menggunakan bebas visa (BVK) dengan nol rupiah, tidak ada PNBP dan tidak akan meningkatkan pendapatan per kapita sektor keimigrasian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R. (2018). Penolakan Orang Asing Ke Indonesia Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut (Refused Entry Persons to Indonesia through Immigration Border Controls at International Airports: Absolute Sovereignty). *Jurnal Kajian Keimigrasian*, 1(1).
- Damanik, D., Nasrullah, N., Purba, B., Arfandi, S. N., Abdillah, D., Raditya, R., Salim, M. N., Hamidah, S., Rusata, T., & Faried, A. I. (2022). *Ekonomi Pariwisata: Konsep, Pemasaran dan Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Hajar, N. K. D. S., Amrizal, D., Izharshyah, J. R., & Mahardika, A. (2022). *Perencanaan Pembangunan & Pembuatan Kebijakan Daerah: Dari Teori Ke Praktik* (Vol. 1). umsu press.
- Hanief, S., Pramana, D., Kom, S., & Kom, M. (2018). *Pengembangan Bisnis Pariwisata dengan Media Sistem Informasi*. Penerbit Andi.
- Iqbal, M. (2022). *Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Dividen di CV Maraja & MICE Kota Makassar dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah*. IAIN Parepare.
- Machmud, M. (2016). Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah. *Research Report*.
- Mirwanto, T. (2016). Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Muta'ali, L., Marwast, D., & Christanto, J. (2018). *Pengelolaan wilayah perbatasan NKRI*. UGM PRESS.
- Saryono, A. (2010). Metodologi penelitian kualitatif dalam bidang kesehatan. *Yogyakarta: Nuha Medika*, 98–99.
- Statistik, B. P. (2020). Indeks pembangunan manusia. *Retrieved Februari, 18*.
- Sugiyono, D. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D/Sugiyono. *Bandung: Alfabeta*, 15(2010).
- Sulistiyani, A. T., Hadrianus, S., & Nursam. (2019). *Pelayanan Kependudukan Berbasis E-Government* (M. N. Amir, S. Fuad, & A. Pramandaru (eds.); 1st ed.). Dirjen PPPMD.
- Tasik, V. R., Sambiran, S., & Sampe, S. (2019). Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Wilonotomo, W., Putra, B. H., & Arifin, R. (n.d.). Rancangan Sistem Pendeteksian Paspor Palsu: Solusi Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia. *JUSTIN (Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 8(4), 409–417.
- Wirasto, W., Suhaidi, S., Siregar, M., & Leviza, J. (2015). Pelaksanaan pengawasan warga negara asing di wilayah kerja kantor imigrasi kelas ii belawan berdasarkan uu no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. *USU Law Journal*, 4(1), 168–185.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).